

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK Jawa Barat

Kondisi Keuangan Pemerintah Bekasi Sedang Sakit, BPK Obral WTP?

<https://www.inijabar.com/2019/05/kondisi-keuangan-pemerintah-bekasi.html>

inijabar.com, Kabupaten Bekasi- Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk yang ke lima kalinya sejak tahun 2014.

Raihan tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemkab Bekasi untuk tahun anggaran 2018. Prestasi ini selain diterima dengan senang hati,

Namun ada juga yang bertanya-tanya ada apa dengan BPK yang terkesan mengobral gratis opini WTP.

"Ini BPK seperti mengobral opini WTP saja pada daerah-daerah yang sedang bermasalah soal keuangan daerah. Kita tahu di Kabupaten Bekasi dampak dari kasus suap korupsi ijin Meikarta, serapan anggaran daerah tidak maksimal dan PAD juga terseok-seok."ungkap praktisi ekonomi, Dwi Budi Sulis. Kamis (30/5/2019).

Pria yang tinggal di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ini juga melihat ke anehan yang sama di Kota Bekasi. Yang juga mendapat opini WTP yang ke 4 kalinya.

"Keuangan daerah Kota Bekasi sejak 2018 dan 2019 ini sedang defisit hingga ratusan miliar. Bahkan banyak diprediksi Pemkot Bekasi sulit menyembuhkan kesulitan defisit keuangan hingga tiga atau empat tahun kedepan,"bebernya.

Pernyataan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang meyakini kondisi keuangan Kota Bekasi akan take off di bulan Juli 2019 dipastikan tidak akan terwujud.

"Saat ini saja defisit keuangan Kota Bekasi makin membengkak. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi termasuk menaikkan pajak PBB malah jadi tidak maksimal dalam menyerap PAD dari sektor ini."tandasnya.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH